



# JURNAL AKUNTANSI & INVESTASI

The Balance Sheet as the Earnings Management Constraint  
(Case Study in Indonesia Manufacturing Company)

**DWI SUDARYATI**

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi  
Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi  
Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi

**BENY ARIFIN W**

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kepuasan Aparatur  
Pemerintah Daerah Menggunakan Model Delone dan Mclean

**JABAL FIRDAUS ARIFIN & Dr. SURYO PRATOLO, SE., M.Si., Akt**

(Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

Pengaruh Profitabilitas, Resiko Keuangan, Nilai Perusahaan, Struktur Kepemilikan  
dan Divident Payout Ratio Terhadap Perataan Laba

**DIKA FAJAR PRATAMA**

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Pengaruh Personal Background, Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran,  
dan Political Culture Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah.

**SIGIT ARIE WIBOWO**

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Pengaruh Kas, Bonus SWBI (Sertifikat Wadiah BANK INDONESIA),  
Marjin Keuntungan, dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Murabahah  
(Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia)

**KRISTIA OCTAVINA & EMILE SATIA DARMA**

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta





## **Pengaruh *Personal Background*, Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran, dan *Political Culture* Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah.**

**SIGIT ARIE WIBOWO**

**Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

### **ABSTRACT**

*This research aims to examine the influence of personal background, council budget knowledge, and political culture toward the role of DPRD on the financial control. This research is motivated by the fact that individual background is believed to affect the individual behaviour on political activity. The Independent variables in this research are personal background, council budget knowledge, and political culture. The dependent variable is the role of DPRD on the area of financial control planning, implementing, and responsibility steps.*

*The data in this research consist of primary data that were taken from questionnaires distributed directly to and collected from 144 members of DPRD at Karesidenan Cirebon. The hypotheses are examine by using independent t test, Analysis of Variance (ANOVA), and multiple regression.*

*The result shows that personal bacground and political culture have no significant influence towards the role of DPRD on the area financial control. But, the council budget knowledge has significant influence towards the role of DPRD on area financial report.*

*Keywords: personal backgorund, Council budget knowledge, political culture, the role of DPRD, region financial control.*

### **PENDAHULUAN**

Dikeluarkannya Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1999 yang dirubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 yang dirubah menjadi UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (pemda), merupakan era baru hubungan antara pemerintah pusat dan pemda di Indonesia. Masalah yang muncul dari perubahan beberapa UU tersebut salah satunya yaitu dibutuhkannya manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel (Mardiasmo, 2011).



DPRD dalam pengawasan keuangan daerah berperan besar dan memiliki nilai strategis untuk dapat mengontrol kebijakan keuangan daerah. Walaupun pada kenyataannya masih terdapat permasalahan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah dari aspek lembaga legislatif yaitu rendahnya peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam keseluruhan siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pelaporan maupun pengawasan program kerja eksekutif.

Lemahnya kontrol pemda dan DPRD terhadap kebijakan keuangan daerah menyebabkan perencanaan yang tidak optimal dalam penyusunan APBD. Sebagai contoh pada Rancangan APBD salah satu pemda di Jawa Tengah, yang mana dana untuk kepentingan pribadi (pejabat) lebih besar dibandingkan dengan dana untuk masyarakat. (Jawa Pos, Januari 2006).

Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang pengawasan keuangan daerah diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Murni dan witono pada tahun 2004 menunjukkan bahwa strata pendidikan, latar belakang pekerjaan, dan asal partai politik berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Sedangkan jenis kelamin, usia, bidang pendidikan, pengalaman politik, pengalaman di DPRD, ideologi partai politik, dan asal komisi tidak berpengaruh.

Hasil penelitian yang belum konsisten dan masih terbatasnya penelitian di bidang sektor publik, memotivasi peneliti untuk meneliti kembali pengaruh *personal background* dan *political culture* terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Penelitian ini berusaha menggabungkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Murni dan Witono (2004), Banu (2003), dan Jaka dan Sri (2007) dengan menambah pengetahuan anggaran sebagai variabel dependen sebagaimana dalam penelitian Sopanah (2003).

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini mengambil judul pengaruh *personal background*, pengetahuan dewan tentang anggaran, dan *political culture* terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

## RUMUSAN MASALAH

1. Apakah ada hubungan antara personal background dengan peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah?
2. Apakah pengetahuan dewan tentang anggaran mempengaruhi peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah?
3. Apakah political culture mempengaruhi peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS HUBUNGAN PERSONAL BACKGROUND DAN PENGAWASAN KEUANGANDAERAH.

La Palombara (1974) dalam Banu (2003) menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap, perilaku, dan peran legislatif yaitu meliputi

institusi politik, partai politik, karakteristik personal (latarbelakang, sosialisasi, nilai, dan ideologi), pengalaman politik, dan sifat pemilih.

Hal ini dibuktikan dalam penelitian empiris yang dilakukan David M Farrell dan Ian Mc Allister (1995) dalam Banu (2003) mengenai pola perekrutan calon anggota legislatif di Australia untuk senate dan house of representatives. Dalam penelitian tersebut Farrel dan Mc Allister menggunakan personal background yang meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan, dan agama. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa selain variabel usia, yaitu variabel jenis kelamin, pendidikan, dan agama menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara calon anggota senate (upper) dan house of representatives (lower) dari aspek personal background.

Hal tersebut membuktikan bahwa faktor personal background mempengaruhi pemilihan calon anggota legislatif yang juga menunjukkan pengaruh peran dan perilakunya di legislatif. Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

- H1a: Ada perbedaan peran DPRD perempuan dengan peran DPRD laki-laki dalam pengawasan keuangan daerah.
- H1b: Ada perbedaan variance usia berdasarkan peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.
- H1c: Ada perbedaan variance bidang pendidikan berdasarkan peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.
- H1d: Ada perbedaan variance strata pendidikan berdasarkan peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.
- H1e: Ada perbedaan variance pengalaman politik berdasarkan peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

#### HUBUNGAN PENGETAHUAN ANGGARAN DAN PENGAWASAN KEUANGANDAERAH.

Beberapa penelitian yang menguji hubungan antara kualitas anggota dewan dengan kinerja dewan membuktikan bahwa kualitas dewan yang diukur dengan pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan keahlian berpengaruh terhadap kinerja dewan dengan alat ukur melakukan fungsi pengawasan (Indradi, 2001; Syamsiar, 2001; 2002; Sutarnoto, 2002; Sopanah, 2003; Jaka dan Sri, 2007).

Pengetahuan erat kaitannya dengan pendidikan dan pengalaman, ketiganya mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Pengalaman dan pengetahuan yang tinggi akan sangat membantu anggota dewan dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat (Truman, 1960 dalam Jaka dan Sri, 2007). Pengetahuan yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Dengan mengetahui tentang anggaran, anggota dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran. Dari pemaparan tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H2: Pengetahuan dewan tentang anggaran mempengaruhi peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

## HUBUNGAN POLITICAL CULTURE DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH.

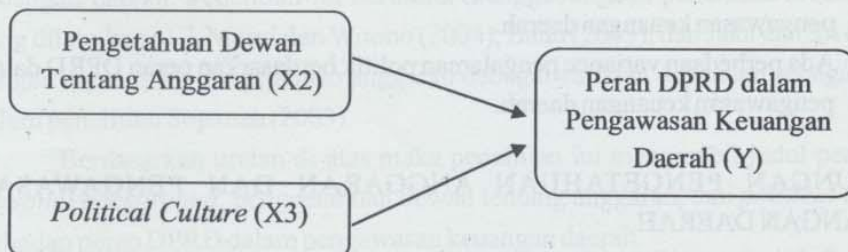
Peranan dari budaya politik berkenaan dengan pengaruh budaya politik pada perilaku orang yang bersangkutan, terdiri dari tiga aspek peranan, yaitu:

1. Pola kepemimpinan, yaitu apakah menuntut konformitas atau mendorong inisiatif dan kebebasan.
2. Sikap terhadap mobilitas, yaitu mempertahankan status quo atau mendorong mobilitas.
3. Prioritas kebijaksanaan, yaitu apakah suatu kebijaksanaan menekan aspek ekonomi atau politik.

Jaka dan Sri (2007) menyebutkan bahwa variabel *political culture* yang terdiri dari pengalaman di DPRD, pengalaman politik, dan ideologi partai politik tidak berpengaruh terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, sedangkan asal partai politik dan asal komisi berpengaruh terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Dari pemaparan tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: *Political culture* mempengaruhi peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Model pengetahuan yang dibangun untuk metode regresi hipotesis 2 dan hipotesis 3 dapat digambarkan sebagai berikut:



## METODE PENELITIAN

### OBJEK PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah anggota DPRD Kabupaten atau Kota se-karesidenan Cirebon.

### POPULASI DAN SAMPEL

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Se-Karesidenan Cirebon, yang meliputi Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, dan Kota Cirebon. Sampel diambil dengan menggunakan metode Non Random Sampling yaitu pemilihan sampel secara tidak acak. Caranya dengan menyebar kuesioner kepada semua anggota populasi dengan maksud untuk memperoleh jumlah pengembalian kuesioner yang representatif.

## TEKNIK PENGUMPULAN DATA

### 1. Data Primer.

Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian. Pertama, data yang merupakan personal background yang meliputi: jenis kelamin, usia, strata pendidikan, latar belakang pendidikan, dan pengalaman politik. Kedua, data mengenai persepsi responden terhadap variabel penelitian yang berupa political culture dan pengetahuan anggaran.

### 2. Data Sekunder.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa struktur keanggotaan DPRD di masing-masing daerah.

## DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL

### *Pengawasan Keuangan Daerah*

Pengawasan keuangan daerah dalam penelitian ini meliputi tiga dimensi, diantaranya penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Variabel ini terdiri dari 16 butir pertanyaan untuk dimensi penyusunan, 8 butir pertanyaan untuk dimensi pelaksanaan, dan 10 butir pertanyaan untuk dimensi pertanggungjawaban. Variabel ini diukur menggunakan skala likert dengan skor 1 sampai 5.

### *Personal Background*

Variabel ini meliputi beberapa dimensi, yaitu: jenis kelamin, usia, strata pendidikan, bidang pendidikan, dan pengalaman politik. Variabel ini diukur dengan skala nominal.

### *Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran*

Pengetahuan merupakan persepsi responden tentang anggaran RAPBD atau APBD dan deteksi terhadap pemborosan atau kegagalan dan kebocoran anggaran. Variabel ini terdiri dari 8 butir pertanyaan yang diukur menggunakan skala likert dengan skor 1 sampai 5.

### *Political Culture*

Variabel ini merupakan suatu konstruk yang terdiri dari dimensi orientasi nilai, sikap terhadap tradisi dan perubahan, tingkat militansi, pola kepemimpinan, sikap terhadap mobilitas, dan prioritas kebijaksanaan. Variabel ini terdiri dari 10 butir pertanyaan yang diukur menggunakan skala likert dengan skor 1 sampai 5.

## METODE ANALISIS DATA

### *Uji independen t-test*

Pengujian ini digunakan untuk menguji hipotesis 1a dan hipotesis 1c, apakah ada perbedaan peran DPRD perempuan dengan DPRD laki-laki dalam pengawasan keuangan daerah. Sedangkan hipotesis 1c menguji apakah ada perbedaan bidang pendidikan berdasarkan peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

### Analisis of Variance

Pengujian ini digunakan untuk menguji hipotesis 1b, 1d, dan 1e yang menunjukkan apakah ada perbedaan variance usia, strata pendidikan, dan pengalaman politik berdasarkan peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Pengaruh *Personal Background*,  
Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran,  
dan *Political Culture*  
Terhadap Peran DPRD  
dalam Pengawasan Keuangan Daerah.

### Analisis Regresi Berganda

Pengujian ini digunakan untuk menguji pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran dan *political culture* terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

## ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Tabel 1  
Demografi Responden

Keterangan		Frekuensi	Prosentase
Kabupaten/Kota	Indramayu	8	23,5
	Kuningan	13	38,2
	Cirebon	9	26,4
	Majalengka	4	11,7
	Jumlah	34	100
Jenis Kelamin	Laki-laki	29	85
	Perempuan	5	15
	Jumlah	34	100
Usia	30-39 ahun	13	38
	40-49 tahun	15	44
	50-59 tahun	5	15
	≥ 60 tahun	1	3
	Jumlah	34	100
Bidang Pendidikan	Eksakta	2	6
	Sosial	32	94
	Bahasa	0	0
	Jumlah	34	100
Strata Pendidikan	SLTA Sederajat	3	9
	Diploma	1	3
	Sarjana	27	79
	Lain-lain	3	9
	Jumlah	34	100
Pengalaman Politik	5-9 tahun	7	21
	10-14 tahun	19	56
	15-19 tahun	4	12
	≥20 tahun	4	12
	Jumlah	34	100

### PENGUJIAN HIPOTESIS

Hipotesis 1a: Ada perbedaan peran DPRD perempuan dengan peran DPRD laki-laki dalam pengawasan keuangan daerah.

Tabel 2  
Penguujian *Independent Sample Test*

Keterangan	Levene's Test		t-Test	
	F	Sig	T	Sig. (2-tailed)
PKD	2,444	0,128	1,150	0,258
			1,535	7,583

Berdasarkan perhitungan pada tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai t sebesar 1,150 dan *p value* (0,258) >  $\alpha$  (0,05) sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis 1a ditolak, artinya tidak ada perbedaan peran antara anggota DPRD perempuan dengan anggota DPRD laki-laki dalam pengawasan keuangan daerah.

Hipotesis 1b: Ada perbedaan *variance* usia berdasarkan peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Tabel 3  
Penguujian Anova

Keterangan	Levene Statistic	Sig.	F	Sig.
PKD	1,388	0,265	0,851	0,477

Berdasarkan perhitungan pada tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai t sebesar 1,388 dan *P value* (0,477) >  $\alpha$  (0,55) sehingga dapat dikatakannya bahwa hipotesis 1b ditolak, artinya tidak ada perbedaan *variance* usia berdasarkan peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Hipotesis 1c: Ada perbedaan *variance* bidang pendidikan berdasarkan peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Tabel 4  
Penguujian *Independent Sample Test*

Keterangan	Levene's Test		t-Test	
	F	Sig	T	Sig. (2-tailed)
PKD	0,653	0,425	-2,729	0,010
			-1,773	0,318

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai t sebesar -2,729 dan *p value* (0,010) <  $\alpha$  (0,05) sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis 1c didukung, artinya ada perbedaan *variance* bidang pendidikan berdasarkan peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Hipotesis 1d: Ada perbedaan *variance* strata pendidikan berdasarkan peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Tabel 5  
Penguujian Anova

Keterangan	Levene Statistic	Sig.	F	Sig.
PKD	2,218	0,147	2,657	0,086



Berdasarkan perhitungan pada tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai  $t$  sebesar 2,218 dan  $P\text{ value } (0,086) > \alpha (0,05)$  sehingga dapat dikatakannya bahwa hipotesis 1d ditolak, artinya tidak ada perbedaan *variance* strata pendidikan berdasarkan peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Hipotesis 1e: Ada perbedaan *variance* pengalaman politik berdasarkan peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Tabel 6  
 Pengujian Anova

Keterangan	Levene Statistic	Sig.	F	Sig.
PKD	0,331	0,803	0,148	0,930

Berdasarkan perhitungan pada tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai  $t$  sebesar 0,031 dan  $P\text{ value } (0,930) > \alpha (0,05)$  sehingga dapat dikatakannya bahwa hipotesis 1e ditolak, artinya tidak ada perbedaan *variance* pengalaman politik berdasarkan peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

## ANALISIS REGRESI

Tabel 7  
 Hasil Pengujian *Multiple Regression*

Keterangan	Pengawasan Keuangan Daerah			
	$\beta$	SE	t-value	Sig.
Constant	149,912	25,700	5,833	0,000
Pengetahuan Anggaran	-1,314	0,526	-2,497	0,018
Political Culture	-0,202	0,441	-0,457	0,651
F	3,496			
Sig	0,043			
R	0,429			
R Square	0,184			

Hipotesis 2: Pengetahuan dewan tentang anggaran mempengaruhi peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Berdasarkan perhitungan pada tabel 7 dapat dilihat bahwa nilai  $t$  sebesar -2,497 dan  $P\text{ value } (0,018) < \alpha (0,05)$  sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis 2 didukung, artinya Pengetahuan dewan tentang anggaran mempengaruhi peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Hipotesis 3: *Political culture* mempengaruhi peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Berdasarkan perhitungan pada tabel 7 dapat dilihat bahwa nilai  $t$  sebesar -0,457 dan  $P\text{ value } (0,651) > \alpha (0,05)$  sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis 3 ditolak, artinya *political culture* tidak mempengaruhi peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### KESIMPULAN

1. Personal background yang terdiri dari jenis kelamin, usia, strata pendidikan, dan pengalaman politik tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hal tersebut karena dalam praktiknya dewan lebih mengedepankan prinsip kolektivitas.
2. Bidang pendidikan mempengaruhi peran DPRD dalam melakukan pengawasan keuangan daerah. Kondisi ini dikarenakan dalam rutinitas kegiatannya dibutuhkan spesifikasi bidang yang ditekuni oleh anggota dewan.
3. Political culture tidak mempengaruhi peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Walaupun ideologi tiap partai berbeda-beda sehingga menimbulkan multikultural culture, tetapi dewan lebih mengutamakan kemufakatan dalam menghadapi suatu permasalahan.
4. Pengetahuan anggaran memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Artinya dewan tidak selalu harus paham mengenai permasalahan anggaran untuk melakukan pengawasan keuangan daerah. Rutinitas kerja menjadi media pembelajaran bagi anggota dewan dalam hal pemahaman terhadap permasalahan anggaran.

### KETERBATASAN

1. Birokrasi yang diterapkan di masing-masing daerah memiliki kebijakan yang berbeda. Hal ini menyebabkan kurang optimalnya ketika penyebaran kuesioner.
2. Waktu penelitian berbenturan dengan jadwal anggota dewan.
3. Objek penelitian masih satu kawasan karesidenan.

### SARAN

1. Spesifikasi sampel perlu dilakukan, karena ada banyak bidang di kantor DPRD, diantaranya: panitia anggaran, panitia musyawarah, komisi, dan fraksi.
2. Penyesuaian jadwal penelitian dengan jadwal anggota dewan.
3. Memperluas objek penelitian dengan melibatkan seluruh DPRD di provinsi Jawa Barat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, W., 2001, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang, Edisi 17 Bulan Juni.
- Bastian, I., 2006, Sistem Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta.
- Bawono, R. I., 2004, Problematika Penerapan *Good Governance* di Indonesia, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik, Universitas Gadjah Mada, Vol. 05 No. 02 Bulan Agustus.
- Coryanta, I., 2007, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah, Makalah Simposium Nasional Akuntansi X, Makasar.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia., 2006, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Mardiasmo., 2002, Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo., dan Wijaya, K., 1999, Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berorientasi pada Kepentingan Publik, Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Sistem Informasi, STIE "YO" Yogyakarta.
- Nazaruddin, I., 2008, Modul Praktikum Statistik, Unit Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Republik Indonesia, 1999, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, 26 Juni 2008, diambil dari: [http://www.setneg.go.id/index.php?option=com\\_perundangan&catid=1&itemid=42&catname=UU7tahun=1999](http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&catid=1&itemid=42&catname=UU7tahun=1999).
- Republik Indonesia, 2001, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Citra Umbara, Bandung.
- Republik Indonesia, 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, 26 Juni 2008, diambil dari: [http://www.setneg.go.id/index.php?option=com\\_perundangan&catid=1&itemid=42&catname=UU&tahun=2004](http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&catid=1&itemid=42&catname=UU&tahun=2004).
- Republik Indonesia, 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 26 Juni 2008, diambil dari: [http://www.setneg.go.id/index.php?option=com\\_perundangan&catid=1&itemid=42&catname=UU&tahun=2004](http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&catid=1&itemid=42&catname=UU&tahun=2004).
- Sopannah, 2003, Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah, Tesis Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Tidak dipublikasikan.

Pengaruh *Personal Background*,  
Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran,  
dan *Political Culture*  
Terhadap Peran DPRD  
dalam Pengawasan Keuangan Daerah.

- Sujianto A. E., 2007, Aplikasi Statistik Dengan SPSS Untuk Pemula, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Sutikno, 2001, Peranan Peran Serta Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan dalam Menghadapi Otonomi Daerah, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang, Edisi 17 Bulan Juni.
- Sumidiningrat B., Bulan Oktober, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Menggerakkan Ekonomi Rakyat, Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Sistem Informasi, STIE "YO" Yogyakarta.
- Werimon, S., dkk., 2007, Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah, Makalah Simposium Nasional Akuntansi X, Makasar.
- Winarna, J., dan Murni, S., 2007, Pengaruh *Personal Background, Political Background*, dan Pengatahuan Dewan tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah, Makalah Simposium Nasional Akuntansi X, Makasar.
- Witono B., 2003, Pengaruh *Personal Background dan Political Culture* terhadap Peranan DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah, Tesis Pascasarjana UGM Yogyakarta, tidak dipublikasikan.

## PENDAHULUAN

Bank syariah adalah satu-satunya di Indonesia yang menerapkan sistem bagi hasil. Bank syariah mampu tetap bertahan dan berkembang di era globalisasi, sedangkan perekonomian Indonesia mengalami krisis. Di era bank-bank konvensional mengalami krisis kepercayaan dari para nasabahnya, bank syariah tetap mampu mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah tersebut. Sementara itu, bank syariah melakukan perbandingan pada sisi lain dan melakukan perbandingan langsung antara bank yang dikelola secara konvensional. Bank syariah juga melakukan perbandingan terhadap bank konvensional operasional.